

PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)													
		Nomor: 37.00/04.0/000273/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023													
Nomor SPM : 37.00/03.0/000302/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 Tanggal : 21 Desember 2023 SKPD : MAJELIS RAKYAT PAPUA		Dari : BUD Tahun Anggaran : 2023													
<p>Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp140.000.000 (terbilang: seratus empat puluh juta rupiah)</p> <p>Kepada : TERLAMPIR NPWP : 405253931954000 No. Rekening Bank : 1111111111111111 Bank Penerima : Bank Papua Keperluan Untuk : Pembayaran Honorarium Penunjukan Narasumber/Tenaga Ahli Panitia Pembahasan Penyusunan Tata Tertib (Bagian Persidangan) Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan MRP Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG) Pagu Anggaran : Rp1.937.999.400 Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus</p>															
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)												
1	9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	Rp140.000.000												
2	9.02.02.3.01.05	Penyusunan Peraturan MRP	Rp140.000.000												
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp140.000.000												
		Jumlah	Rp140.000.000												
<p>Potongan-potongan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPH 21</td> <td style="text-align: center;">9.240.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;">9.240.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan	1.	PPH 21	9.240.000			Jumlah	9.240.000	
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan												
1.	PPH 21	9.240.000													
	Jumlah	9.240.000													
<p>SP2D yang Dibayarkan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah yang Diminta (Bruto)</th> <th style="text-align: center;">Rp140.000.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: center;">Rp9.240.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: center;">Rp130.760.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: center;">Rp140.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: seratus empat puluh juta rupiah</p>				Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp140.000.000	Jumlah Potongan	Rp9.240.000	Jumlah Netto	Rp130.760.000	Jumlah yang Dibayarkan	Rp140.000.000				
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp140.000.000														
Jumlah Potongan	Rp9.240.000														
Jumlah Netto	Rp130.760.000														
Jumlah yang Dibayarkan	Rp140.000.000														
		<div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Pemerintah Provinsi PAPUA TENGAH </div> <div style="text-align: center;"> Tgl. 29 Desember 2023 BUD DODANARA UMUM DAERAH YOHAN TONO TENOUYE, S.E. NP/197001291997011001 </div> </div>													
<p>Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima</p>															

Sudah diverifikasi

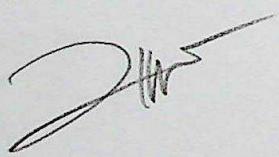
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire - Papua Tengah 98811

KPD : MRP
Nilai : 140.000.000
CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS

Honorarium/Penghasilan lainnya, Lembur,
dan Biaya Perjalanan Dinas

- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- SK Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan/Penetapan Jabatan (pada awal pencairan);
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Daftar Potongan & E-biling PPh 21 (apabila ada);
- Surat Tugas/Surat Perintah Tugas;
- Surat Perintah Lembur;
- Daftar Pembayaran Lembur;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- Visum SPPD;
- Bukti Tiket, boarding pass Pesawat dan Hotel;
- Kwitansi Bermaterai Penerima SPPD;
- Lembar Verifikasi PPK-SKPD.
- Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli.

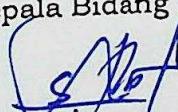
Yang memverifikasi



.....
NIP.

Nabire, 21 Dec. 2023

Mengetahui/Menyetujui
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan



Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA
Jl. Mandala-Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire

Nomor : 900/788/SET/MRP/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Hal : Pengantar SPM LS

Nabire 21 Desember 2023

Kepada
Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Provinsi Papua Tengah
di
N A B I R E

Berdasarkan Peraturan Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-LS untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber (Bagian Persidangan) Sub Keg. Penyusunan Peraturan MRP (OTSUS BG) untuk keperluan Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima (Pihak Ketiga)	Jumlah yang diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	21 Desember 2023	37.00/03.0/000302/ LS/9.03.0.00.0.00.2 2.0000/P.03/12/2023	TERLAMPIR	Rp.140.000.000

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

SEKRETARIS MRP
PROVINSI PAPUA TENGAH
DANIEL MAIPON, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760423 199612 1 001

Format Dokumen Checklist/ Penelitian Kelengkapan SPM-LS
CHECKLIST/ PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

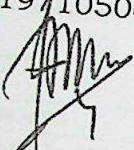
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
- Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);
- Berita Acara hasil pelelangan ;
- RAB;
- Faktu Barang ;
- Faktur Tagihan;
- Dokumentasi Barang ;
- Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- Surat Permohonan Pembayaran;
- Berita Acara Pembayaran;
- Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- Referensi bank;
- Surat Jaminan bank;
- Fotocopy rekening giro bank;
- Fotocopy NPWP/ PKP;

Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;

- BILLING PPh dan PPN;
- E-faktur pajak;
- Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama : MATILDA MOSE, S.Sos
Tanggal : 21 Desember 2023
NIP : 197105062003122008
Tanda Tangan : 

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun: 2023

No. SPM: 37.00/03.0/000302/LS/9.03.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

DAHARA UMUM DAERAH

PROVINSI PAPUA TENGAH

menerbitkan SP2D kepada:

KPD

Bendahara /
Pihak Ketiga *)

No. Rekening Bank

Nama Bank

NPWP

Dasar Pembayaran

Sumber Dana

: MAJELIS RAKYAT PAPUA
: TERLAMPIR
: 11111111111111
: Bank Papua
: 405253931954000
: 37.00/01.0/000007/9.03.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023
: 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus

Untuk Keperluan:

Pembayaran Honorarium Penunjukan Narasumber/Tenaga Ahli Panitia
Pembahasan Penyusunan Tata Tertib (Bagian Persidangan) Sub Kegiatan
Penyusunan Peraturan MRP Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah
sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)

Pembebaan pada kode kegiatan

KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI
SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023		
9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	Rp140.000.000
9.02.02.3.01.05	Penyusunan Peraturan MRP	Rp140.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp140.000.000
	Jumlah	Rp140.000.000

Jumlah SPP yang Diminta:

(terbilang: seratus empat puluh juta rupiah)

Rp140.000.000

Nomor dan Tanggal SPP

37.00/02.0/000290/LS/9.03.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023

Potongan-potongan:

No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah
1	PPH 21	028338773824040	Rp9.240.000
Jumlah			Rp9.240.000

Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp140.000.000
Jumlah Potongan	Rp9.240.000
Jumlah Netto	Rp130.760.000
Jumlah yang Dibayarkan	Rp140.000.000

Uang sejumlah: (seratus empat puluh juta rupiah)



Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran


DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000302/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000302/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp140.000.000 (terbilang seratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di MAJELIS RAKYAT PAPUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran


DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : MATILDA MOSE. S.Sos

NIP : 197105062003122008

jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000290/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 21 Desember 2023

PPK SKPD



MATILDA MOSE. S.Sos

NIP. 197105062003122008

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000290/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000290/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp140.000.000 (terbilang seratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000289/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000289/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp67.900.000 (terbilang enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

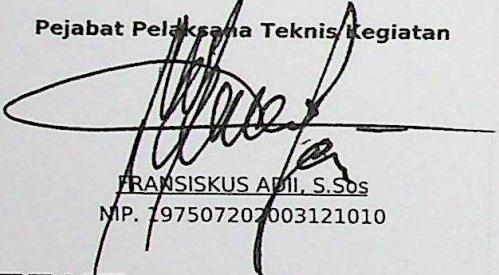
Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 Nomor: 37.00/02.0/000289/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa	
SPP-LS	
1. Nama SKPD/Unit Kerja	: MAJELIS RAKYAT PAPUA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: terlampir
3. Nama Pengguna Anggaran	: DANIEL MAIPON, S.STP
4. Nama PPTK	: FRANSISKUS ADII, S.Sos
5. Nama Bendahara Pengeluaran	: MARYAM NGANGUN
6. NPWP Bendahara Pengeluaran	: 405253931954000
7. Nama Bank	: Bank Papua
8. Nomor Rekening Bank	: 9000102000212
9. Untuk Keperluan	: Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib (Bagian Persidangan) Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan MRP Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)
10. Dasar Pengeluaran	: SPD nomor: 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 tanggal 30-06-2023 Sebesar: Rp67.900.000 (terbilang: enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
No	Uraian
I	SPD Tanggal : 30-06-2023 Nomor : 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 Rp5.753.260.229
II	SP2D Sebelumnya Tanggal : - Nomor : - -
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  <u>FRANSISKUS ADII, S.Sos</u> <u>NIP. 197507202003121010</u>	
Nabire, 21 Desember 2023 Bendahara Pengeluaran  <u>MARYAM NGANGUN</u> <u>NIP. 197708042008012025</u>	
	
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran	

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 37.00/02.0/000289/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023			
9.02.02.3.01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9.02.02.3.01.05 Penyusunan Peraturan MRP			
1.	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp67.900.000

TOTAL : Rp67.900.000

Terbilang: enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran

DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

Nabire, 21 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

MARYAM NGANGUN
NIP. 197708042008012025

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000290/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa

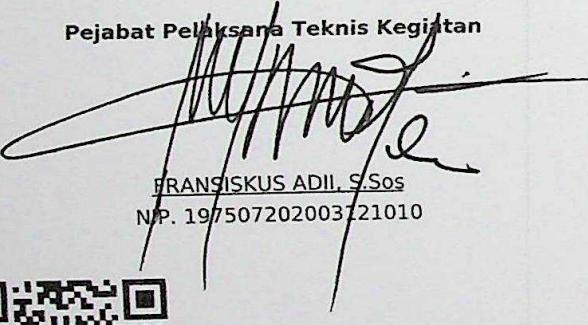
SPP-LS

1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	MAJELIS RAKYAT PAPUA
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	:	DANIEL MAIPON, S.STP
4.	Nama PPTK	:	FRANSISKUS ADII, S.Sos
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARYAM NGANGUN
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	405253931954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000212
9.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Honorarium Penunjukan Narasumber/Tenaga Ahli Panitia Pembahasan Penyusunan Tata Tertib (Bagian Persidangan) Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan MRP Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 tanggal 30-06-2023 Sebesar: Rp140.000.000 (terbilang: seratus empat puluh juta rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 30-06-2023	Nomor : 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Rp5.753.260.229
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-

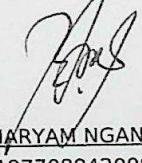
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


FRANSISKUS ADII, S.Sos
 NIP. 197507202003721010

Nabire, 21 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran


MARYAM NGANGUN
 NIP. 197708042008012025



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000290/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023			
9.02.02.3.01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9.02.02.3.01.05 Penyusunan Peraturan MRP			
1.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp140.000.000

TOTAL : Rp140.000.000

Terbilang: seratus empat puluh juta rupiah.

Mengetahui/Menytujui,
Pengguna Anggaran


DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

Nabire, 21 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran


MARYAM NGANGUN
NIP. 197708042008012025

NPWP : 40.525.393.1-954.000
NAMA : MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI
ALAMAT : JL. MANDALA - KAB. NABIRE

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.9.240.000
TERBILANG : Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : PPH21PembymHonorariumPenunjukkanNARSUM/TenagaAHliKeg.Pembah
asan&PenyuTATIB

NPWP PENYETOR : 40.525.393.1-954.000
NAMA PENYETOR : MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3877 3824 040
MASA AKTIF : 22/01/2024 20:37:19

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
Jl. Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR : 800 / 13 / 867 MRP - 997

TENTANG

PENUNJUKAN NARA SUMBER/TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PEMBAHASAN DAN
PENYUSUNAN TATA TERTIB MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023 - 2028
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
b. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan Pembahasan dan Penyusunan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua tengah di maksud, dipandang perlu Menunjuk Nara Sumber/Tenaga Ahli untuk mendampingi agar dalam Pembahasan dan Penyusunan tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.4-4231 Tahun 2023 Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tanggal 26 Oktober 2023;
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Nara Sumber/Tenaga Ahli pada Kegiatan Pembahasan dan Penyusunan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Priode 2023-2028, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan Nara Sumber Tenaga Ahli pada Kegiatan Penyusunan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Priode 2023-2028 dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas ikut berpartisipasi memberikan saran dan masukan sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam Penyusunan Tata Tertib tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

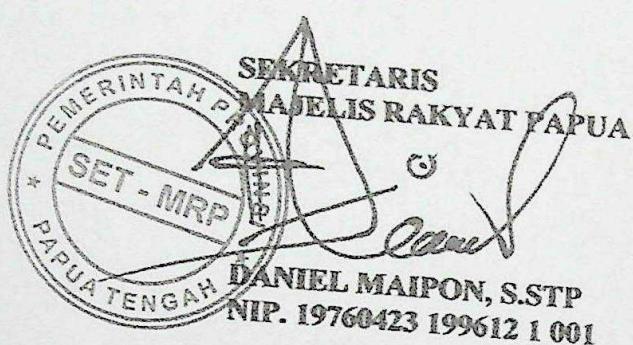
Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 30 Oktober 2023



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR : 800 / 13 / SET MRP - PPT
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA AHLI YANG DITUNJUK SEBAGAI NARA SUMBER
TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PENYUSUNAN TATA TERTIB MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. JORAM WAMBRAUW, SH, M.Hum
2. YOHAN WANAHAN
3. BENNY KARTEH, SH, M.Hum
4. ANDARIAS GOO, S.Sos, M.Si
5. MENASE YOTENI, SH
6. YERMIAS BINDOSANO, SH



**DAFTAR PENERIMA HONOR TENAGA AHLI /NARA SUMBER
PEMBAHASAN TATA TERTIB MAJELIS RAKYAT PAPUA PROPISNI PAUA TENGAH**

NO	NAMA	JML KEGIATAN	JUMLAH JAM	NILAI PER KEGIATAN	JUMLAH	PPH 5%, 15 %	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN	REKENING
1	MENASE YOTENI, SH	7	4	850.000	23,800,000	1,190.000	22,610,000	1	9000201106562
2	JORRAM WAMBRAUW, SH, M.HUM.	7	4	850.000	23,800,000	1,190.000	22,610,000	2	1020201019235
3	DR. ANDREAS GOO	7	4	850.000	23,800,000	1,190.000	22,610,000	3	1100202033033
4	BENYAMIN KARETH, SH.	7	4	850.000	23,800,000	1,190,000	22,610,000	4	9000201035201
5	YERMIAS BINDOSANO, SH.	7	4	800.000	22,400,000	3,360,000	19,040,000	5	9000201262196
6	YOHANES WANAH	7	4	800.000	22,400,000	1,120,000	21,280,000	6	
					140,000,000	9,240,000	130,760,000		9000201132613

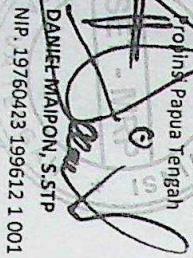
Mengetahui
Sekretaris Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Tengah
*
DANUET MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire, 12 - 12 - 2023
Bendahara
MARYAM NGANGUN
NIP. 19770804 200801 1 025

**DAFTAR PENERIMA HONOR TENAGA AHLI /NARA SUMBER
PEMBAHASAN TATA TERTIB MAJELIS RAKYAT PAPUA PROPISNI PAUA TENGAH**

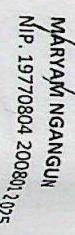
NO	NAMA	JML KEGIATAN	JUMLAH JAM	NILAI PER KEGIATAN	JUMLAH	PPH 5%, 15 %	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDATANGAN	REKENING
1	MENASE YOTENI, SH	7	4	850.000	23,800.000	1,190.000	22,610.000	1	9000201106562
2	JORRAM WAMBRAUW, SH, M.HUM.	7	4	850.000	23,800.000	1,190.000	22,610.000	2	1020201019235
3	DR. ANDREAS GOO	7	4	850.000	23,800.000	1,190.000	22,610.000	3	1100202033033
4	BENYAMIN KARETH, SH.	7	4	850.000	23,800.000	1,190.000	22,610.000	4	9000201035201
5	YERMIAS BINDOSANO, SH.	7	4	800.000	22,400.000	3,360.000	19,040.000	5	9000201262196
6	YOHANES WANAH	7	4	800.000	22,400.000	1,120.000	21,280.000	6	9000201132613
					140,000,000	9,240.000	130,760,000		

Mengetahui
Sekretaris Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Tengah


DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire, 12 - 12 - 2023

Bendahara


MARYAM NGANGUN
NIP. 19770804 200801 1 025